



# AMICUS CURIAE

## *(Sahabat Pengadilan)*

**Sebagai Pertimbangan Kepada Majelis Hakim Yang  
Memeriksa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  
dengan Perkara No : 1186/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL  
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

**Diajukan Oleh:  
Trend Asia  
18 Juni 2025**



## Antara

**PERKUMPULAN  
TRANSFORMASI UNTUK  
KEADILAN INDONESIA**

-----  
-----

**PENGGUGAT I**

**AHMAD S.H**

-----  
-----

**PENGGUGAT II**

**HERNI RAMDLANINGRUM**

-----  
-----

**PENGGUGAT III**

**HARVINA NURUL  
FATIMAH**

-----  
-----

**PENGGUGAT IV**

## Melawan

**PT BANK MANDIRI  
(PERSERO) TBK**

-----  
-----

**TERGUGAT I**

**PT ASTRA AGRO LESTARI  
TBK**

-----  
-----

**TERGUGAT II**

**PT AGRO NUSA ABADI**

-----  
-----

**TERGUGAT III**

## I. IDENTITAS AMICI

1. Bahwa Trend Asia merupakan Organisasi Masyarakat Sipil Independen yang bergerak sebagai akselerator transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia.
2. Bahwa Trend Asia memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub Pasal 2 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan yayasan adalah dalam bidang **sosial dan lingkungan hidup**
3. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang dimaksudkan di atas, pada Pasal 3 menerangkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sebagai suatu institusi penggerak dan pelaksana kegiatan-kegiatan terkait **pola pengelolaan sumber daya alam antara lain namun tidak terbatas pada isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan berdasarkan partisipasi seluruh elemen masyarakat**, swasta dan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
  - b. Sebagai institusi yang mendorong energi terbarukan menjadi sumber energi utama;
  - c. Sebagai sarana untuk mentransformasikan perkotaan yang dapat mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
  - d. Sebagai institusi analisis yang mengolah dan menyajikan data terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan yang terdiri dari kegiatan lokal, regional dan global;
  - e. **Sebagai penghubung dan fasilitator diantara para pemegang kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan** dan ekosistem perkotaan di Indonesia;
  - f. Sebagai institusi yang menghimpun, mengolah dan mendistribusikan berbagai informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
  - g. Mengadakan penelitian dan pelatihan dalam bentuk workshop, seminar dan talkshow tentang isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
  - h. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat luas yang mempunyai dasar, maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar;

4. Bahwa melalui Amicus Curiae, Trend Asia memberi pertimbangan kepada **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Dengan No Perkara : 1186/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL**, untuk mendorong Bank Nasional tidak membiayai proyek yang merusak lingkungan;

## II. PERNYATAAN KEPENTINGAN TREND ASIA

Trend Asia adalah organisasi masyarakat sipil independen yang bergerak sebagai akselerator transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia. Produk pengetahuan yang kami hasilkan berkaitan dengan isu-isu advokasi keuangan, karena memiliki signifikansi untuk menjadi titik tekan pada proyek pembangunan bermasalah. Kami meyakini bahwa tidak ada uang, maka tidak ada proyek, sehingga posisi advokasi ini penting untuk memberi tahu pemilik uang yang digunakan oleh perusahaan agar tidak menimbulkan efek bagi lingkungan hidup dan manusia.

Beberapa contoh penelitian kami tentang advokasi keuangan antara lain:

1. Laporan "Investasi LNG Indonesia, Jalan Mundur Komitmen Iklim" mengkritisi keterlibatan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral (MDBs) yang masih mendukung proyek gas sebagai bagian dari transisi energi, yang justru menghambat komitmen iklim Indonesia sesuai Perjanjian Paris.

Investasi besar dalam infrastruktur gas mengunci ketergantungan negara pada bahan bakar fosil, menyebabkan dampak negatif lingkungan, sosial, termasuk kasus korupsi dan tata kelola buruk. Pemerintah Indonesia menganggap gas sebagai jembatan transisi energi, namun pendekatan ini dinilai ambigu dan berisiko greenwashing.

Laporan merekomendasikan agar bank pembangunan mengutamakan pendanaan untuk energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan, serta pemerintah segera menetapkan kebijakan transisi energi yang transparan tanpa mengandalkan gas untuk mencapai target pengurangan emisi dan keberlanjutan lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Investasi LNG Indonesia, Jalan Mundur Komitmen Iklim, Maret 2025, [Link](#)

2. Laporan lainnya yaitu mengkritik keterlibatan International Finance Corporation (IFC), lengan investasi dari World Bank Group (WBG), melalui perantara keuangan seperti OCBC NISP, DBS Bank Ltd, dan KEB Hana, membiayai proyek-proyek industri nikel di Kawasan Industri Pulau Obi yang berdampak negatif serius terhadap lingkungan dan sosial. 2

3. Laporan berjudul "Bagaimana Dukungan IFC untuk PLTU Captive di Kawasan Industri Nikel Menghancurkan Pulau Obi" ini menyoroti emisi gas rumah kaca sebesar 3.489.944 ton CO<sub>2</sub>e pada 2022, didominasi oleh penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara captive yang sangat merusak.

IFC dinilai gagal memastikan kliennya mematuhi Standar Kinerja dan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS), serta belum menutup celah kebijakan yang memungkinkan pendanaan terhadap proyek dengan emisi tinggi. Laporan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap klien IFC, pelarangan investasi pada industri nikel yang bergantung pada batubara, penerapan metodologi Green Equity Approach (GEA) secara ketat termasuk pada PLTU captive, dan transparansi lengkap atas penilaian dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan komitmen Perjanjian Paris demi mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan mendukung transisi energi bersih.

Laporan lain berjudul "Mendanai Untuk Menunda" adalah mengenai pentingnya advokasi keuangan sebagai strategi krusial untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan mendorong lembaga keuangan, khususnya bank, berhenti membiayai industri batu bara yang merusak lingkungan dan memperpanjang krisis iklim. 3

Melalui tekanan dari masyarakat sebagai nasabah dari bank komersial dan penguatan kebijakan terkait keterbukaan dan manajemen risiko terhadap pemilik manfaat serta figur publik yang terkait dengan batu bara, advokasi diharapkan dapat mengurangi dukungan finansial terhadap energi kotor dan mempercepat dekarbonisasi sektor energi, sejalan dengan komitmen terhadap Paris Agreement serta mencegah praktik greenwashing dan climate delay.

---

<sup>2</sup> Bagaimana Dukungan IFC untuk Batubara Captive di Kawasan Industri Nikel Menghancurkan Pulau Obi?, Oktober 2023, [Link](#)

<sup>3</sup> Mendanai Untuk Menunda: Lembaga Keuangan, Korporasi dan Individu yang Berpotensi Menghambat Transisi Energi Bersih yang Berkeadilan, Juli 2024, [Link](#)

### III. **PENDAPAT AMICI DALAM AMICUS CURIA**

#### A. **Institusi Keuangan Sebagai Target Advokasi dan Kampanye**

Dalam praktik advokasi dan kampanye keuangan, pendana merupakan salah satu target karena mereka mengucurkan uang untuk perusahaan guna membangun sebuah proyek. Pendanaan dari institusi keuangan ke proyek mencakup utang berupa pinjaman dan surat utang serta ekuitas.

Institusi keuangan memiliki tipe mencakup multilateral development banks (bank pembangunan multilateral), export credit agencies (lembaga kredit ekspor), commercial banks (bank komersial), dan investors (investor).

Bank pembangunan multilateral beroperasi secara global melibatkan negara-negara sebagai pemegang saham dan mempengaruhi kebijakan dalam penyaluran hutangnya. Termasuk bank pembangunan multilateral adalah World Bank Group, Asian Development Bank, Africa Development Band, Asian Infrastructure International Bank, dan European Bank for Reconstruction and Development.

Sebagai contoh ketika perusahaan minyak dan gas ExxonMobil memutuskan untuk mengembangkan cadangan minyak besar di lepas pantai Guyana, sebuah negara di Amerika Selatan, Bank Dunia memberikan pinjaman untuk membantu Guyana dalam memperbaiki undang-undang minyaknya. Firma hukum yang ditunjuk untuk tugas tersebut telah menjadi firma hukum andalan ExxonMobil selama 40 tahun.

Export credit agencies (agensi kredit ekspor) merupakan pembiayaan pembiayaan penjualan peralatan dan jaminan pinjaman bank swasta Bank Pembangunan KfW dari Jerman, US-Export Import, DFC, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), China Export Import Bank (China Eximbank), dan lainnya. Sebagai contoh adalah Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) menjamin pinjaman bank sindikasi senilai US\$1,7 miliar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah.

Pada sisi lain terdapat peran investor menyediakan modal kepada perusahaan dengan membeli obligasi atau saham baru yang diterbitkan.

Contohnya adalah Khazanah Nasional Berhad, Layanan Pensiun Nasional Korea Selatan, BlackRock, Fidelity, Allianz, dan lain-lain. Contoh implementasi adalah pada September 2021, manajer aset Fidelity berbasis di Amerika Serikat, membeli obligasi SUEK senilai US\$ 37 juta. SUEK adalah perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Rusia dan operator pembangkit listrik batu bara.

Sementara itu, fungsi bank komersial dalam pembangunan adalah menyediakan pinjaman dan layanan investasi perbankan kepada perusahaan. Di antaranya adalah Citigroup, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada, Standard Chartered, serta Bank Industri dan Perdagangan China. Sebagai contoh adalah pinjaman sindikasi dari Bank of America, Commerzbank, dan Bank Pertanian China termasuk di antara bank investasi terkemuka untuk penerbitan obligasi senilai US\$ 500 juta oleh SUEK pada tahun 2021.

Terhadap semua jenis tipe institusi keuangan tersebut berperan untuk mendukung proyek perusahaan. Maka ketika sebuah proyek menimbulkan dampak terhadap manusia dan lingkungan, salah satu pihak yang bertanggung jawab adalah institusi keuangan. Karena dari institusi keuangan tersebut sebuah proyek dapat berdiri dan beroperasi. Pada praktiknya hampir sebagian besar perusahaan membutuhkan institusi keuangan mengingat sifat proyek yang padat modal, maka opsi pendanaan dari mereka bersifat mutlak.

## **B. Uang Bersifat Fugitive**

Sejak uang bersifat fugitive, yang berarti ia memiliki karakteristik cair dan mudah berpindah lintas batas tanpa hambatan, pengawasan terhadap pergerakannya menjadi tantangan besar bagi otoritas finansial suatu negara.

Hal ini membuat uang tidak hanya sulit dilacak tetapi juga rentan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penggelapan pajak, hingga pendanaan terorisme. Kondisi ini diperparah oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, yang memfasilitasi transfer uang secara instan dan anonim, terutama melalui platform digital dan kripto aset.

Uang bersifat fugitive dalam konteks pendanaan proyek yang membahayakan manusia dan lingkungan karena ia dapat bergerak dengan cepat melintasi batas yurisdiksi, regulasi, dan pertanggungjawaban hukum. Mobilitas tinggi ini memungkinkan dana dialihkan dengan mudah dari satu proyek kontroversial ke proyek lainnya, menghindari pengawasan publik dan menciptakan tantangan besar bagi mekanisme akuntabilitas sosial maupun lingkungan.

Dalam praktiknya, karakteristik fugitive ini terlihat jelas dalam proyek infrastruktur skala besar yang melibatkan sektor ekstraktif, seperti tambang atau PLTU batubara. Perusahaan-perusahaan multinasional yang mengoperasikan proyek ini seringkali memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan cangkang dan lembaga keuangan internasional, membuat pelacakan arus dana dan pengungkapan tanggung jawab atas dampak negatif lingkungan maupun sosial menjadi semakin sulit (Global Witness, 2016).<sup>4</sup>

Dampaknya, proyek yang merusak lingkungan atau mengabaikan hak asasi manusia bisa terus menerima pembiayaan meski mendapat protes dan tekanan dari masyarakat sipil maupun komunitas terdampak.

Untuk mengatasi tantangan ini, transparansi keuangan yang ketat serta regulasi yang kuat dalam pelaporan lintas batas menjadi kunci dalam memastikan bahwa uang yang sifatnya fugitive tidak terus menerus mendanai proyek-proyek yang merugikan manusia dan lingkungan (European Parliament, 2018). Tanpa penguatan regulasi dan pengawasan tersebut, sifat fugitive dari uang akan terus memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang sistematis.<sup>5</sup>

Terhadap sebuah konglomerasi perusahaan sifat fugitive uang dapat berpindah dari satu grup ke anak perusahaan dan dari anak perusahaan ke grup melalui berbagai skema. Misalnya skema utang intra-perusahaan

---

<sup>4</sup> Global Witness. (2016). Hidden Menace: How secret company structures facilitate environmental and human rights abuses. London: Global Witness. [Link](#)

<sup>5</sup> European Parliament. (2018). Transparency, Accountability and Integrity in the EU Institutions. Brussels: Directorate-General for Internal Policies.

yaitu utang yang terjadi antara perusahaan dalam satu kelompok usaha atau grup perusahaan. Utang ini bisa digunakan untuk modal kerja anak perusahaan. Seharusnya liabilitas atau tanggung jawab induk perusahaan yang memberi utang ini tidak dapat dipisahkan jika anak perusahaan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebab, induk perusahaan akan tetap menerima pembayaran utang dan bunga.

Dengan kata lain ada keuntungan yang didapatkan dari utang ke anak usaha. Ketika hal itu terjadi, maka kaitan induk-anak menjadi relevan untuk dimintai tanggung jawab secara bersama-sama. Inilah yang disebut sebagai kebijakan intermediary dalam advokasi keuangan yaitu menyasar perantara pendanaan proyek berupa induk perusahaan yang terlibat dalam proses rantai uang. Maka penting menggarisbawahi bahwa sejak uang bersifat fugitive, maka pada semua mata rantai aliran dapat dimintai tanggung jawab.

### **C. Institusi Keuangan Perlu Sejalan dan Patuh Perjanjian Iklim**

Institusi keuangan global memiliki tanggung jawab besar untuk memainkan peran aktif dalam menghadapi krisis iklim. Untuk merealisasikan hal ini, institusi tersebut perlu secara konsisten mematuhi berbagai komitmen iklim yang telah mereka sepakati secara global. Kepatuhan terhadap komitmen-komitmen ini penting, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban moral dan etis, tetapi juga untuk secara konkret mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan iklim dan mendorong investasi ke arah yang berkelanjutan.

Salah satu cara efektif untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah dengan bergabung dan aktif berpartisipasi dalam kelompok atau inisiatif internasional yang secara spesifik menangani transisi keuangan menuju ekonomi rendah karbon. Selain bergabung dengan Net Zero Asset Managers Initiative, banyak institusi keuangan telah bergabung dengan gerakan pro-iklim seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) dan Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

GFANZ merupakan koalisi internasional yang menyatukan berbagai pelaku sektor keuangan—mulai dari perbankan, asuransi, hingga pengelola aset—dengan tujuan mempercepat pencapaian target nol emisi pada 2050

dan menjaga suhu global tetap 1,5 derajat Celcius.<sup>6</sup> GFANZ berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kolaborasi global serta memastikan adanya aksi nyata dari sektor keuangan dalam menyelaraskan investasi mereka dengan Perjanjian Paris. GFANZ merupakan salah satu grup terbesar untuk kelompok institusi keuangan global dengan anggota sekitar 550 institusi keuangan dari 50 yurisdiksi.

Sementara itu, NZBA secara khusus menghimpun institusi perbankan di seluruh dunia untuk berkomitmen dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi yang jelas guna mengurangi emisi karbon dalam portofolio pinjaman dan investasi mereka. Bergabung dengan NZBA akan mendorong institusi perbankan untuk menetapkan target-target berbasis sains (science-based targets) dan meningkatkan transparansi pelaporan terkait kemajuan menuju net-zero emissions.

Dengan aktif bergabung dan berkontribusi dalam inisiatif seperti Net Zero Asset Managers Initiative, GFANZ, dan NZBA, institusi keuangan global tidak hanya memperkuat komitmen mereka terhadap iklim, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kolaborasi ini akan membantu mempercepat pencapaian tujuan global untuk mengatasi tantangan perubahan iklim secara efektif dan terukur.

Pentingnya institusi keuangan untuk sejalan dengan komitmen iklim agar pergerakan mereka tidak membuat bumi menjadi lebih panas. Sebagai contoh, masih adanya pembiayaan dari institusi keuangan yang tergabung dengan GFANZ ke industri fosil dengan menyediakan ratusan miliar dollar untuk ekspansi proyek fosil.<sup>7</sup> Hal ini bertentangan dengan komitmen mereka untuk menjaga bumi dan kenaikan suhu tetap di jalurnya.

Dalam praktik di Indonesia, bank-bank komersial nasional seharusnya juga memiliki komitmen iklim yang kuat. Sebab Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap dampak krisis iklim seperti pesisir

---

<sup>6</sup> GFANZ Reveals Year of Membership Growth and Implementation in Annual Progress Report, Expands Leadership with New Principal Group Members, Oktober 2022, [Link](#)

<sup>7</sup> Throwing fuel on the fire: GFANZ members provide billions in finance for fossil fuel expansion, Januari 2023, [Link](#)



yang tenggelam akibat kenaikan air muka laut. Yang terjadi terkadang sebaliknya, sebab bank-bank nasional memiliki standar due diligence yang rendah untuk memastikan klien-kliennya tidak akan menimbulkan dampak lingkungan dan tidak membahayakan manusia. Ketika terjadi kerusakan hingga pelanggaran hukum, maka bank-bank juga ikut serta tanggung jawab. Untuk menghindarinya, maka sejak proses paling awal untuk pembiayaan proyek memerlukan acuan komitmen iklim yang jelas untuk mencegahnya.

TREND ASIA 